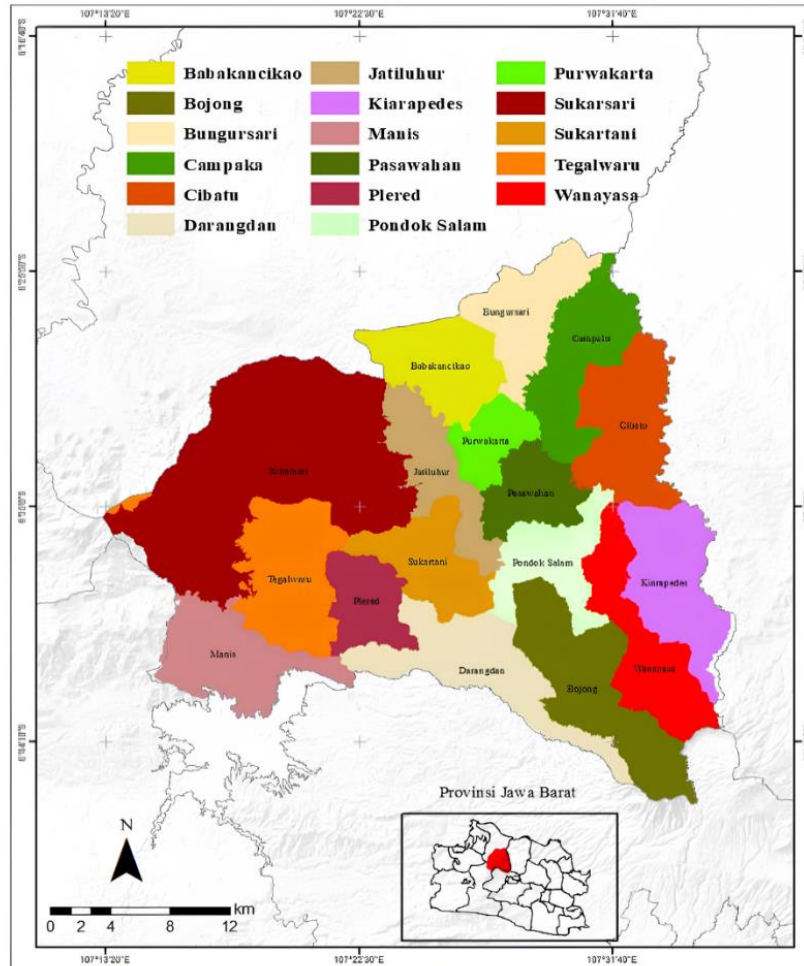


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Profil Kabupaten Purwakarta



Gambar 4. 1 Peta Lokasi Kabupaten Purwakarta

Sumber: https://www.researchgate.net/figure/Gambar-1-Wilayah-penelitian-di-Kabupaten-Purwakarta-Provinsi-Jawa-Barat_fig1_367595265

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Barat dengan luas wilayah mencapai 971,72 km². Berdasarkan posisi geografisnya kabupaten Purwakarta ini berbatasan dengan kabupaten Karawang dan Subang di sebelah utara, Kabupaten Karawang, Cianjur, dan Bogor di sebelah barat, Kabupaten Bandung

Barat dan Cianjur di sebelah selatan serta kabupaten Subang dan Bandung Barat di sebelah timur. Selain itu, Purwakarta ini terdiri dari 17 kecamatan dengan total 192 desa/kelurahan. Pada tahun 2024 jumlah penduduknya tercatat sebanyak 1.052.276 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.083 jiwa/ km².

Pada aspek ekonomi, struktur *produkt domestik regional bruto* (PDRB) Purwakarta ini didominasi oleh sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran dan transportasi serta pergudangan. Dimana hal ini memperkuat identitas Purwakarta sebagai salah satu kawasan industri strategis di Jawa Barat. Selain itu, Purwakarta memiliki potensi pendapatan daerah yang cukup besar dari pajak hotel, restoran, reklame, hiburan serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Dengan potensi ini, Purwakarta terus melakukan optimalisasi sumber daya lokal dan kebijakan fiskal daerah yang tepat sasaran untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Purwakarta, 2025).

2. Kebijakan Pajak Daerah di Kabupaten Purwakarta

a. Jenis Pajak yang Diterapkan di Kabupaten Purwakarta

Di Kabupaten Purwakarta, jenis-jenis pajak yang diterapkan berdasar pada ketentuan No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dan dituangkan dalam Perda Kabupaten Purwakarta No. 15 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut merupakan jenis-jenis pajak yang tercantum, yaitu:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan
- 2) Pajak Hotel, yang dikenakan pada penyediaan akomodasi hotel dan penginapan.
- 3) Pajak Hiburan, yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan
- 4) Pajak Restoran, yang dikenakan atas penyediaan makanan dan minuman di restoran.

- 5) Pajak Parkir, yang dikenakan atas penggunaan tempat parkir kendaraan.
- 6) Pajak Reklame, yang dikenakan atas pemasangan iklan dan reklame diruang publik.
- 7) Pajak air tanah, yang dikenakan atas pemanfaatan air tanah.
- 8) Pajak penerangan jalan, yang dikenakan untuk penerangan jalan umum
- 9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yang dikenakan saat perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- 10) Pajak galian C, yang dikenakan atas penggalian sumber daya alam.
- 11) Pajak atas barang dan jasa tertentu, yang dikenakan atas barang dan jasa tertentu yang beredar di daerah.

Peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai pendukung pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten Purwakarta.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a) Uji Validitas

Uji Validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} , dengan ketentuan:

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, Maka item dikatakan **Valid**

Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, Maka item dikatakan **tidak Valid**

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas Variabel Pajak Daerah (X)

No	Kode Pernyataan	r hitung	r Tabel	Keterangan
1	PD.1	0.337	0.197	Valid
2	PD.2	0.537	0.197	Valid
3	PD.3	0.785	0.197	Valid

No	Kode Pernyataan	r hitung	r Tabel	Keterangan
4	PD.4	0.739	0.197	Valid
5	PD.5	0.737	0.197	Valid
6	PD.6	0.713	0.197	Valid
7	PD.7	0.701	0.197	Valid
8	PD.8	0.714	0.197	Valid
9	PD.9	0.804	0.197	Valid
10	PD.10	0.715	0.197	Valid
11	PD.11	0.752	0.197	Valid
12	PD.12	0.730	0.197	Valid
13	PD.13	0.730	0.197	Valid
14	PD.14	0.498	0.197	Valid

Sumber: Output SPSS25, 2025

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS 25 terhadap 100 responden, maka diperoleh nilai r hitung untuk masing-masing item pada variabel X. nilai r tabel digunakan sebagai acuan adalah sebesar 0,195 (N=100 dan tingkat signifikansi 5%) seluruh item lebih dari r tabel sehingga dikatakan Valid.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)

No	Kode Pernyataan	r hitung	r Tabel	Keterangan
1	KM.1	0.645	0.197	Valid
2	KM.2	0.633	0.197	Valid
3	KM.3	0.695	0.197	Valid
4	KM.4	0.615	0.197	Valid
5	KM.5	0.738	0.197	Valid
6	KM.7	0.640	0.197	Valid
7	KM.8	0.692	0.197	Valid
8	KM.9	0.678	0.197	Valid

No	Kode Pernyataan	r hitung	r Tabel	Keterangan
9	KM.10	0.643	0.197	Valid
10	KM.11	0.687	0.197	Valid
11	KM.12	0.663	0.197	Valid
12	KM.13	0.668	0.197	Valid

Sumber: Output SPSS25, 2025

Berdasarkan hasil dari pengolahan maka diperoleh nilai r hitung untuk masing-masing item pada variabel Y, seluruh item pada r hitung lebih besar daripada r tabel sehingga dapat disimpulkan seluruh item Valid. Dengan demikian, seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, baik pada variabel X maupun Y, telah memenuhi syarat validitas.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat menghasilkan data yang konsisten, stabil, dan dapat dipercaya jika diujikan pada responden yang serupa dalam waktu yang berbeda. Untuk menilai reliabilitas, menggunakan teknik Cronbach's Alpha dengan ketentuan $\geq 0,60$, itu dianggap reliabel. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25, diperoleh nilai Cronbach's Alpha pada variabel X dan Y sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Y

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Pajak Daerah (X)	0,764	15	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,753	13	Reliabel

Sumber: Output SPSS25, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Cronbach's Alpha untuk variabel pajak daerah (X) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y) masing-masing lebih besar dari 0,06, yang dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut reliabel.

2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang tinggal di kabupaten Purwakarta yang berusia produktif dengan rentang antara 18 hingga 59 tahun. Jumlah responden yang telah dikumpulkan sebanyak 100 responden dengan berbagai karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan dan domisili tempat tinggal.

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari total responden yang terkumpul, mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 64 orang atau 64%, sedangkan sisanya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang atau 36%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden dalam pengisian kuesioner ini didominasi perempuan seperti yang tergambar pada tabel dibawah:

Tabel 4. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	64	64%
2	Laki-Laki	36	36%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Dalam penelitian ini, rentang usia responden terbanyak berjumlah 30 orang (30%) berasal dari kelompok usia 25-34 tahun, diikuti oleh usia 18-24 tahun sebanyak 25 orang (25%). Kelompok usia 35-44 tahun berjumlah 21 orang (21%), kelompok usia 45-54 tahun sebanyak 14 orang (14%) dan sisanya berada pada kelompok usia 55-59 sebanyak 10 orang (10%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari usia muda yang masih berada pada masa aktif dan produktif, seperti yang terlihat pada gambar di bawah:

Tabel 4. 5 Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	18–24 tahun	25	25%
2	25–34 tahun	30	30%
3	35–44 tahun	21	21%
4	45–54 tahun	14	14%
5	55-59 tahun	10	10%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 50 orang (50%) dan SMA/SMK sebanyak 32 orang (32%). Sisanya memiliki tingkat pendidikan SMP sebanyak 8 orang (8%), tingkat SD sebanyak 5 orang (5%), S2/S3 sebanyak 4 orang (4%) dan Diploma sebanyak 1 orang (1%). Dengan demikian, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi seperti yang tercantum pada tabel di bawah:

Tabel 4. 6 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	S1	50	50%
2	SMA/SMK	32	32%
3	SMP	8	8%
4	SD	5	5%
5	S2/S3	4	4%
6	Diploma	1	1%
Total		10	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

d. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan responden cukup bervariasi, namun didominasi oleh kategori Pegawai Swasta dan Lainnya. Sementara sisanya

terdiri dari Pelajar/Mahasiswa, Ibu rumah tangga, petani/nelayan, pegawai negeri, dan pekerjaan lainnya.

Tabel 4. 7 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Swasta	28	28%
2	Lainnya	24	24%
3	Pelajar/Mahasiswa	18	18%
4	Ibu Rumah Tangga	12	12%
5	Buruh	8	8%
6	Wirasusaha	6	6%
7	Petani/Nelayan	3	3%
8	Pegawai Negeri	1	1%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

e. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan

Responden yang memilih tidak menyebutkan jumlah penghasilannya berjumlah 22 orang responden (22%) dan berpenghasilan antara Rp2.500.001-Rp5.000.000 berjumlah 22 (22%). Sementara itu, terdapat 20 responden (20%) yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000 per bulan, 16 orang (16%) dengan penghasilan tidak tetap. Sisanya, 12 orang (12%) memiliki penghasilan di atas Rp5.000.000. Sebagian responden lainnya (8%) menyatakan berpenghasilan antara Rp1.000.000-Rp2.500.000.

Tabel 4. 8 Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan Per Bulan

No	Penghasilan Per Bulan	Jumlah	Persentase
1	2.5-5 juta	22	22%
2	Tidak disebutkan	22	22%
3	<1 juta	20	20%
4	Tidak tetap	16	16%
5	>5 juta	12	12%

No	Penghasilan Per Bulan	Jumlah	Persentase
6	1-2.5 juta	8	8%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

f. Deskripsi Responden Berdasarkan Domisili Tempat Tinggal

Responden tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Purwakarta yang berkontribusi dalam pengisian kuesioner antara lain Purwakarta, Plered, Wanayasa, Tegalwaru, Jatiluhur, Bojong, Cibatu, Campaka, Sukatani, Babakan Cikao, Darangdan, Kiarapedes, Bungursari, dan Pondok Salam.

Tabel 4. 9 Distribusi Responden Berdasarkan Domisili Tempat Tinggal

No	Domisili	Jumlah	Persentase
1	Plered	14	14%
2	Purwakarta	11	11%
3	Tegalwaru	8	8%
4	Bojong	7	7%
5	Jatiluhur	6	6%
6	Pondok Salam	6	6%
7	Wanayasa	6	6%
8	Sukatani	6	6%
9	Babakan Cikao	6	6%
10	Darangdan	6	6%
11	Kiarapedes	4	4%
12	Cibatu	3	3%
13	Campaka	3	3%
14	Maniis	2	2%
15	Bungursari	2	2%
16	Pasawahan	2	2%
17	Sukasari	2	2%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer diolah, 2025

3. Deskripsi Data Variabel

Pada penelitian ini, Deskripsi data variabel meliputi *mean*, median, *range*, varians, standar deviasi dan menampilkan display data

(Histogram). Deskripsi data ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dari setiap variabel penelitian, sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Deskripsi Data Variabel

		Statistics	
		X	Y
N	Valid	100	100
	Missing	0	0
<i>Mean</i>		47.59	51.34
Std. Deviation		9.041	6.472
Variance		81.739	41.883
<i>Range</i>		43	33
Minimum		27	32
Maximum		70	65

Sumber: Output SPSS data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, pada variabel pajak daerah diperoleh Rata-rata (*mean*) sebesar 47,59, Standar deviasi sebesar 9,041, Rentang nilai dari 27 hingga 70 (*range* = 43). Sementara itu, pada variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) diperoleh Rata-rata (*mean*) sebesar 51,34, Standar deviasi sebesar 6,472, Rentang nilai dari 32 hingga 65 (*range* = 33).

a. Deskripsi Variabel Pajak Daerah (X)

Angket variabel pajak daerah (X) terdiri dari 14 item pertanyaan yang disebarkan kepada 100 responden. Nilai tertinggi yang didapat yaitu 70 dari hasil skor keseluruhan variabel pajak daerah (X) dan nilai terendah yang didapat adalah 14.

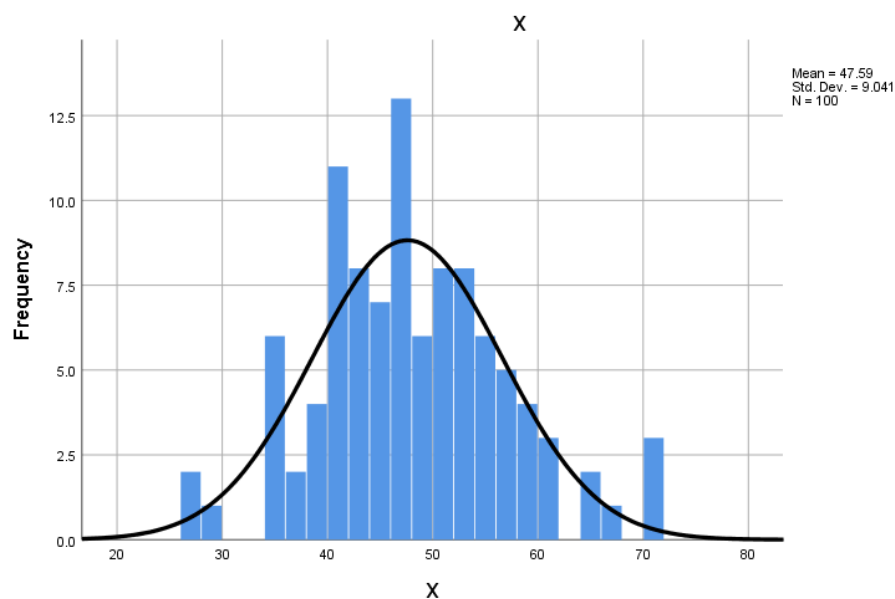
Tabel 4. 11 Deskripsi Variabel Pajak Daerah (X)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	27	2	2.0	2.0	2.0
	29	1	1.0	1.0	3.0
	34	4	4.0	4.0	7.0
	35	2	2.0	2.0	9.0
	36	2	2.0	2.0	11.0
	38	2	2.0	2.0	13.0
	39	2	2.0	2.0	15.0
	40	7	7.0	7.0	22.0
	41	4	4.0	4.0	26.0
	42	5	5.0	5.0	31.0
	43	3	3.0	3.0	34.0
	44	3	3.0	3.0	37.0
	45	4	4.0	4.0	41.0
	46	8	8.0	8.0	49.0
	47	5	5.0	5.0	54.0
	48	4	4.0	4.0	58.0
	49	2	2.0	2.0	60.0
	50	2	2.0	2.0	62.0
	51	6	6.0	6.0	68.0
	52	3	3.0	3.0	71.0
	53	5	5.0	5.0	76.0
	54	3	3.0	3.0	79.0
	55	3	3.0	3.0	82.0
	56	4	4.0	4.0	86.0

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
57	1	1.0	1.0	87.0
58	2	2.0	2.0	89.0
59	2	2.0	2.0	91.0
60	1	1.0	1.0	92.0
61	2	2.0	2.0	94.0
64	1	1.0	1.0	95.0
65	1	1.0	1.0	96.0
66	1	1.0	1.0	97.0
70	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS data Primer, 2025

Hasil angket menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan pajak daerah cenderung positif, terutama dalam fungsi alokasi, seperti tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, nilai persepsi cenderung lebih rendah pada indikator distribusi dan stabilisasi, seperti pemerataan pembangunan, bantuan sosial, dan dukungan terhadap UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pajak daerah telah dimanfaatkan, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek distribusi dan stabilisasi untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata.



Sumber: Output SPSS data Primer, 2025

Gambar 4. 1 Display Data Histogram Deskripsi Variabel X

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi pada angka 46 dan 40 yaitu sebanyak 8 dan 7 responden. Variabel X ini memiliki nilai *mean* 47,59, nilai standar deviasi 9,041 dengan N=100.

b. Deskripsi Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)

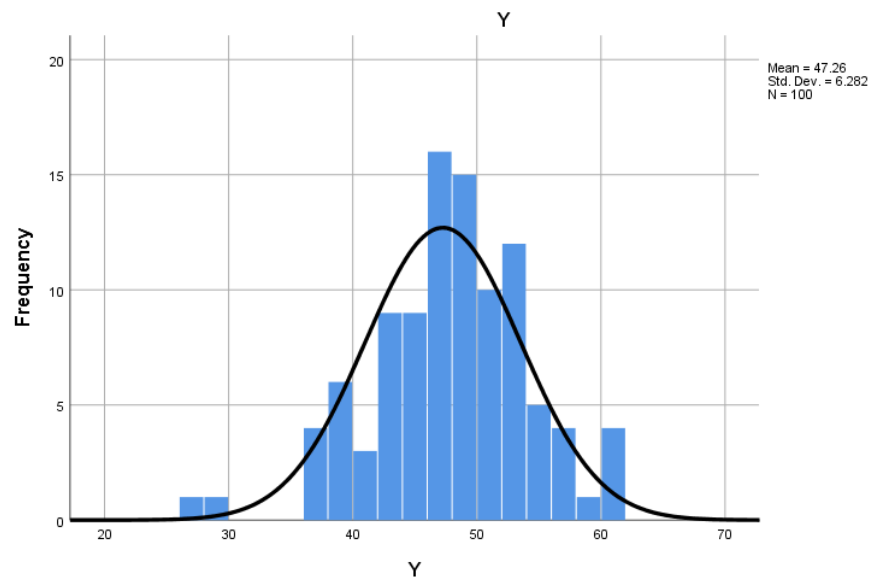
Pada Penelitian ini, angket variabel kesejahteraan masyarakat (Y) terdiri dari 12 Pernyataan. Nilai tertinggi yang diperoleh adalah 65 dari hasil skor keseluruhan variabel kesejahteraan masyarakat (Y). dan nilai terendah yang didapat adalah 23.

Tabel 4. 12 Deskripsi Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	27	1	1,0	1,0
	29	1	1,0	2,0
	36	2	2,0	4,0
	37	2	2,0	6,0
	38	3	3,0	9,0
	39	3	3,0	12,0
	40	2	2,0	14,0

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
41	1	1,0	1,0	15,0
42	8	8,0	8,0	23,0
43	1	1,0	1,0	24,0
44	5	5,0	5,0	29,0
45	4	4,0	4,0	33,0
46	9	9,0	9,0	42,0
47	7	7,0	7,0	49,0
48	11	11,0	11,0	60,0
49	4	4,0	4,0	64,0
50	6	6,0	6,0	70,0
51	4	4,0	4,0	74,0
52	8	8,0	8,0	82,0
53	4	4,0	4,0	86,0
54	4	4,0	4,0	90,0
55	1	1,0	1,0	91,0
56	4	4,0	4,0	95,0
59	1	1,0	1,0	96,0
60	4	4,0	4,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Output SPSS25 data primer, 2025



Gambar 4. 2 Display Data Histogram Deskripsi Variabel Y

Berdasarkan tabel diatas, Frekuensi tertinggi pada angka 48 yakni 11 responden. Variabel Y ini, memiliki nilai *mean* 47,26, standar deviasi 6.282 dengan 100 responden.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk memastikan apakah variabel Pajak Daerah (X) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y) berdistribusi normal. Pada penelitian ini digunakan metode Kolmogorv-Smirnov (Sig. > 0,05).

Tabel 4. 13 Uji Normalitas

<i>One-Sample One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	4,20123818
Most Extreme Differences	<i>Absolute</i>	0,067
	<i>Positive</i>	0,067
	<i>Negative</i>	-0,035
Test Statistic		0,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS25 data primer, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *One-Sample One-Sample Kolmogorov-Smirnov* diperoleh K.S 0,067 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200. Dikarenakan nilai K.S lebih dari 0,05 dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Sehingga, asumsi dalam model regresi sudah terpenuhi.

2) Uji Linearitas

Uji ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel pajak daerah (X) dengan kesejahteraan masyarakat (Y) membentuk garis linear (lurus) atau tidak. Uji ini dilakukan dengan membandingkan dengan membandingkan nilai signifikansi, jika nilai *deviation from linearity sig.* > 0,05 maka ada hubungan linear secara signifikan.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Linearitas

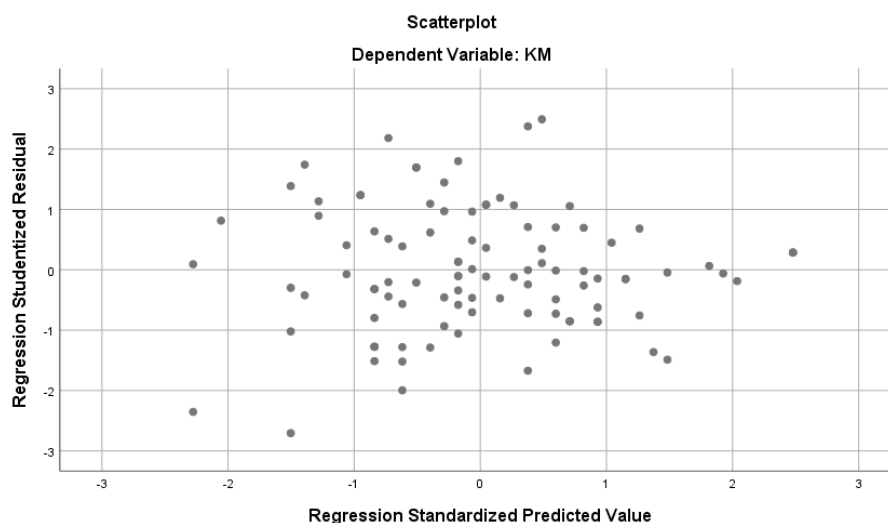
			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
KM * PD	Between Groups	(Combined)	2771,851	32	86,620	5,112	0,000
		Linearity	2159,850	1	2159,850	127,454	0,000
		Deviation from Linearity	612,001	31	19,742	1,165	0,296
	Within Groups		1135,389	67	16,946		
Total			3907,240	99			

Sumber: Output SPSS25 data primer, 2025

Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel INOVA di atas, diperoleh nilai signifikansi antara dua variabel X dan Y pada uji linearity menunjukkan sebesar 0,000 dan nilai *deviaton from linearity* 0,296. Karena nilai linearity $< 0,05$ dan nilai deviation from linearity $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y secara signifikan dan tidak terdapat penyimpangan dari linearitas tersebut. Dengan demikian, kedua variabel ini memenuhi asumsi linearitas serta layak untuk dianalisis lebih lanjut.

3) Uji Heteroskedasitas

Pada pengujian heteroskedasitas ini dilakukan dengan metode scatterplot. Uji scatterplot ini digunakan dengan memplot nilai *Regression Standardized Residual terhadap Regression Standardized Predictes Value*.



Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS25 data primer, 2025

Hasil scatterplot pada Gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah garis nol sumbu Y tanpa membentuk pola kerucut. Sehingga penyebaran residual yang acak ini mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan pada semua nilai prediksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak mengalami heteroskedastisitas.

d. Uji Statistik

1) Uji Koefisien Korelasi

Uji korelasi Pearson ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel Pajak Daerah (PD) dengan Kesejahteraan Masyarakat (KM). dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Uji Koefisien Korelasi

		Correlations	
		PD	KM
PD	Pearson Correlation	1	.743**
	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	100	100
KM	Pearson Correlation	.743**	1

Sig. (2-tailed)	0,000	
N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Output SPSS25 data primer, 2025

Hasil diatas menunjukkan nilai korelasi Pearson (sebesar 0,743) antara variabel PD dan KM, dengan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,000. Hubungan antara pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat tergolong kuat dan positif, dengan nilai korelasi 0,743, yang menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan pajak daerah, maka kecenderungan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan pajak daerah, maka kecenderungan kesejahteraan masyarakat juga cenderung menurun.

Hubungan ini bersifat signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,01$. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel Pajak Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.

2) Analisis Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini, Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yaitu variabel pajak daerah (PD) sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu variabel kesejahteraan masyarakat (KM). Untuk melihat kelayakan model ini, digunakan uji ANOVA (*Analysis of Variance*) yang hasilnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 16 Analisis Linear Sederhana

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2159,850	1	2159,850	121,132	.000 ^b
Residual	1747,390	98	17,831		

Total	3907,240	99		
-------	----------	----	--	--

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Pajak Daerah

Sumber: Output SPSS25 data primer, 2025

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau uji F dalam model regresi linier, diperoleh nilai F hitung sebesar 121,132 dengan nilai signifikansi 0,000. Adapun nilai F tabel pada $\alpha = 0,05$ dengan $df_1 = 1$ dan $df_2 = 98$ adalah sebesar 3,94. Karena F hitung $> F$ tabel ($121,132 > 3,94$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik. Dengan kata lain, variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta..

3) Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel *dependen*. Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel *Coefficients* berikut:

Tabel 4. 17 Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22,674	2,273		9,973	0,000
Pajak Daerah	0,517	0,047	0,743	11,006	0,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

Sumber: Output SPSS25 data primer, 2025

Pada hasil uji t diatas menunjukkan nilai t hitung sebesar 11,006 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), dengan

demikian, Hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

4) Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel Pajak Daerah dapat menjelaskan variabel Kesejahteraan Masyarakat, dilakukan uji koefisien determinasi (*R Square*), yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 18 Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.743 ^a	0,553	0,548	4,223

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah

Sumber: Output SPSS25 data primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas untuk nilai koefisien determinasi (*R Square*) ialah sebesar 0,553, hal ini berarti bahwa sebesar 55,3% variasi yang terjadi pada kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh pajak daerah. Selain itu, sisanya sebesar 44,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi ini. Sementara nilai $R = 0,743$ menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat tergolong kuat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil atau pembahasan hasil yang telah diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti susun, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purwakarta. Berikut hasil dan pembahasannya, yaitu:

1. Deskripsi Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap variabel kesejahteraan masyarakat, yang dievaluasi melalui dua belas indikator,

memberikan informasi penting tentang bagaimana masyarakat Kabupaten Purwakarta melihat berbagai elemen yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Untuk variabel ini, rata-rata (*mean*) skornya adalah 51,34 dari 60 skor maksimum, dengan standar deviasi 6,472. Nilai ini menunjukkan bahwa pemahaman responden relatif sama, meskipun ada perbedaan pandangan di antara mereka.

Dalam aspek Indikator kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Purwakarta secara umum cukup puas dengan layanan kesehatan yang mereka terima. Akses layanan kesehatan (*mean* = 4,15), kondisi kesehatan umum (*mean* = 4,13), dan ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan (*mean* = 3,92) menunjukkan hal ini. Sebagian besar responden yang menjawab menyatakan bahwa mereka setuju dan sepenuhnya setuju bahwa layanan kesehatan dan fasilitas dapat diakses dengan mudah.

Dalam aspek pendidikan, persepsi masyarakat juga cukup positif. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa akses terhadap pendidikan dasar dan menengah (*mean* = 4,08) dan ketersediaan sekolah dan sarana pendidikan (*mean* = 3,84) sudah cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendidikan dasar telah cukup terpenuhi di berbagai wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dalam aspek standar hidup layak, Responden juga memberikan tanggapan yang relatif positif. Mayoritas orang menilai kondisi kehidupan mereka sudah berada pada tingkat yang memadai, menurut indikator seperti pendapatan rumah tangga (*mean* = 3,58), akses air bersih dan sanitasi (*mean* = 3,81), dan kondisi tempat tinggal yang layak (*mean* = 3,64). Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama bagi kelompok rentan.

Aspek kebebasan memilih kehidupan yang bermakna, yang merupakan inti dari teori *Capability Approach*, turut diukur melalui berbagai indikator seperti kebebasan memilih pekerjaan (*mean* = 4,15), partisipasi sosial (*mean* = 4,19), rasa dihargai dan keseimbangan hidup (*mean* = 3,67), dan otonomi pribadi (*mean* = 4,10). Skor-skor ini

menunjukkan bahwa masyarakat merasakan cukup besar kebebasan dan otonomi dalam mengelola kehidupannya, baik secara sosial maupun personal.

Namun, beberapa indikator menerima skor di bawah rata-rata, seperti rasa dihargai dan keseimbangan hidup ($mean = 3,67$) dan kondisi tempat tinggal ($mean = 3,64$), yang menunjukkan bahwa, meskipun orang-orang telah mendapatkan akses ke layanan dasar, masih ada kesulitan untuk mencapai kondisi hidup yang lebih seimbang dan bermakna secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hasil deskriptif ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta berada dalam kategori cukup baik. Masyarakat cenderung menilai positif terhadap aspek-aspek utama kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, standar hidup, dan kebebasan personal. Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya pembangunan daerah dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif yang cukup nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai koefisien determinasi ($R Square$) sebesar 0,553 yang berarti bahwa variabel Pajak Daerah mampu menjelaskan variasi Kesejahteraan Masyarakat sebesar 55,3%, sedangkan sisanya sebesar 44,7% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,743 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif antara Pajak Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Uji F pada tabel ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 121,132 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga model regresi secara simultan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa Pajak Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam uji t, variabel Pajak Daerah menghasilkan nilai t hitung 11,006 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa Pajak Daerah berdampak positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dengan koefisien regresinya sebesar 0,517, dengan asumsi variabel lain tetap, setiap kenaikan 1 satuan Pajak Daerah akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sebesar 0,517 satuan.

Hasil ini sejalan dengan teori Richard A. Musgrave tentang *Three Branches of Public Finance*, yang mengatakan bahwa pajak memainkan peran penting dalam proses alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut data deskriptif, sebagian besar responden setuju hingga sangat setuju dengan indikator Pajak Daerah, seperti ketersediaan layanan pendidikan (dengan skor 4,05), layanan kesehatan (dengan skor 3,99), dan pemeliharaan fasilitas publik (dengan skor 3,51). Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kabupaten Purwakarta telah digunakan untuk memberikan layanan publik yang baik.

Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan pendekatan *Capability Approach*, Amartya Sen juga menunjukkan hasil yang sebanding. Akses ke pendidikan dasar dan menengah, pendapatan rumah tangga, dan akses layanan kesehatan rata-rata tinggi. Ini menunjukkan bahwa alokasi pajak daerah meningkatkan kesejahteraan melalui penyediaan infrastruktur, layanan sosial, dan stabilitas ekonomi lokal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengelolaan pajak daerah, semakin baik kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Hasil ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan fungsi distribusi dan stabilisasi fiskal pemerintah daerah, kebijakan pajak daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek material atau pemenuhan kebutuhan semata, melainkan mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan keadilan distribusi. Hal ini tercermin dalam konsep Maqashid Syariah, yaitu lima

tujuan pokok syariah yang meliputi: *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa): Terlihat dari tingginya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan ($mean = 4,15$), fasilitas medis ($mean = 3,92$), dan kondisi kesehatan umum ($mean = 4,13$). Ini menunjukkan bahwa dana dari pajak daerah telah mampu mendukung pemenuhan kebutuhan vital masyarakat.
- b. *Hifzh al-'aql* (perlindungan akal): Dapat dilihat dari persepsi positif masyarakat terhadap pendidikan, seperti ketersediaan sekolah ($mean = 3,84$) dan akses pendidikan dasar-menengah ($mean = 4,08$). Akses terhadap pendidikan yang baik merupakan bagian dari upaya menjaga dan mengembangkan akal masyarakat.
- c. *Hifzh al-mal* (perlindungan harta): Tercermin dari indikator yang berkaitan dengan penghasilan ($mean = 3,58$), akses air bersih dan sanitasi ($mean = 3,81$), serta kondisi tempat tinggal ($mean = 3,64$). Pajak daerah yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dasar berkontribusi pada perlindungan kekayaan masyarakat dari pengeluaran yang seharusnya ditanggung sendiri.
- d. *Hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan): Terpenuhi melalui fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersedia, yang mendukung keberlangsungan dan kualitas generasi mendatang.
- e. *Hifzh al-din* (perlindungan agama): Meskipun tidak diukur secara eksplisit dalam indikator, aspek ini dapat didukung secara tidak langsung melalui stabilitas sosial dan ekonomi yang memungkinkan masyarakat menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan dengan tenang.

Pajak daerah, dalam konteks ekonomi syariah, bisa dianalogikan seperti *kharaj* atau *'ushr*, yang dipungut oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umat. Selama pemungutannya dilakukan secara adil dan penggunaannya tepat sasaran, maka hukumnya

diperbolehkan bahkan wajib. Di Kabupaten Purwakarta, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang cenderung positif menunjukkan bahwa prinsip '*adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemanfaatan umum) telah mulai terwujud dalam praktik pemungutan dan pemanfaatan pajak daerah.

Namun demikian, beberapa indikator seperti rasa dihargai dan keseimbangan hidup (*mean* = 3,67) dan kondisi tempat tinggal layak (*mean* = 3,64) masih menunjukkan perlunya penguatan dalam pemerataan kesejahteraan. Dalam Islam, keadilan sosial adalah prinsip utama, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk kebijakan fiskal yang inklusif dan merata, termasuk dalam penggunaan dana pajak.